

Tantangan dan Strategi Guru dalam Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di Sekolah Dasar

Ahmad^{1*}

¹ Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Sulawesi Tenggara

*Author Correspondence. Email:ahmad.edukasi@gmail.com Phone:+6285333110009

Abstract : *The Merdeka Belajar Curriculum is one of the initiatives of the Indonesian Ministry of Education, Culture, Research, and Technology to provide more freedom and autonomy to educational units and teachers in the learning process. However, its implementation in Elementary Schools (SD) presents various complex challenges, especially in terms of teacher readiness, availability of facilities, and understanding of the essence of the curriculum itself. This literature study aims to identify the various challenges faced by elementary school teachers in implementing the Merdeka Belajar Curriculum and summarize the strategies that have been implemented to overcome them. This study uses a qualitative method with a literature study approach from various current academic sources, both relevant national and international journals. The results of the study show that the main challenges lie in the aspects of teacher competence, adaptation to digital technology, differentiated learning planning, and strengthening formative assessments. The strategies that emerge include ongoing training, strengthening teacher learning communities, collaboration between stakeholders, and the preparation of flexible and contextual teaching tools. This study concludes that the success of the Merdeka Belajar Curriculum implementation is highly dependent on the synergy between teachers, principals, education offices, and central policies. Systematic and sustainable support is needed to improve teacher capacity in carrying out meaningful educational transformation*

Keywords: *Independent Learning Curriculum, Elementary School Teachers, Implementation Challenges, Learning Strategies*

Abstrak: Kurikulum Merdeka Belajar merupakan salah satu inisiatif Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia untuk memberikan kebebasan dan otonomi lebih kepada satuan pendidikan dan guru dalam proses pembelajaran. Namun, implementasinya di Sekolah Dasar (SD) menghadirkan berbagai tantangan yang kompleks, terutama dalam hal kesiapan guru, ketersediaan sarana, serta pemahaman terhadap esensi kurikulum itu sendiri. Studi literatur ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi guru SD dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka Belajar serta merangkum strategi yang telah diterapkan untuk mengatasinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur dari berbagai sumber akademik terkini, baik jurnal nasional maupun internasional yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa tantangan utama terletak pada aspek kompetensi guru, adaptasi terhadap teknologi digital, perencanaan pembelajaran berdiferensiasi, dan penguatan asesmen formatif. Strategi yang muncul antara lain pelatihan berkelanjutan, penguatan komunitas belajar guru, kolaborasi antar pemangku kepentingan, serta penyusunan perangkat ajar yang fleksibel dan kontekstual. Studi ini menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka Belajar sangat bergantung pada sinergi antara guru, kepala sekolah, dinas pendidikan, dan kebijakan pusat. Diperlukan dukungan sistemik dan berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas guru dalam menjalankan transformasi pendidikan yang bermakna.

Kata Kunci: Kurikulum Merdeka Belajar, Guru Sekolah Dasar, Tantangan Implementasi, Strategi Pembelajaran

1. PENDAHULUAN

Pendidikan di Indonesia terus mengalami dinamika perubahan kurikulum sebagai upaya menjawab tantangan zaman. Salah satu reformasi pendidikan terbaru adalah implementasi Kurikulum Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kurikulum ini dirancang untuk memberikan fleksibilitas kepada satuan pendidikan dan guru agar dapat menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan peserta didik. Menurut Kemendikbudristek (2022) Kurikulum Merdeka memberikan otonomi kepada sekolah untuk mengembangkan kurikulum operasional serta memungkinkan guru menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kemampuan, minat, dan gaya belajar siswa. Hal ini menjadikan peran guru tidak hanya sebagai pengajar, melainkan juga sebagai perancang dan fasilitator pembelajaran yang bermakna.

Di tingkat Sekolah Dasar (SD), implementasi Kurikulum Merdeka membawa tantangan tersendiri. Guru dituntut untuk mengubah paradigma dari pembelajaran yang berpusat pada guru (*teacher centered*) menjadi berpusat pada siswa (*student centered*). Transformasi ini tidak hanya menyangkut metode mengajar, tetapi juga mencakup perubahan dalam penilaian, perencanaan, dan pelibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Seperti diungkapkan oleh Susanto (2021) guru SD perlu membangun pemahaman mendalam tentang pembelajaran diferensiasi dan asesmen formatif, yang menjadi kunci utama dalam Kurikulum Merdeka. Tantangan tersebut semakin kompleks ketika guru harus menerapkannya dalam situasi nyata yang penuh keterbatasan sumber daya dan waktu.

Pemahaman terhadap filosofi dan prinsip dasar Kurikulum Merdeka belum sepenuhnya dimiliki oleh sebagian besar guru SD. Banyak di antara mereka mengalami kebingungan dalam menyusun modul ajar, melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, dan melakukan asesmen yang tidak semata-mata berorientasi pada angka. Penelitian yang dilakukan oleh Widiastuti & Kurniawati (2023) menunjukkan bahwa sekitar 63% guru SD di wilayah urban dan rural mengaku masih kesulitan dalam memahami struktur dan komponen kurikulum baru. Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan teknis saja tidak cukup; guru membutuhkan pendampingan berkelanjutan agar mampu menjalankan pembelajaran yang sesuai dengan semangat Merdeka Belajar.

Selain itu, infrastruktur dan fasilitas belajar juga menjadi tantangan utama dalam penerapan Kurikulum Merdeka. Tidak semua sekolah dasar memiliki akses terhadap teknologi digital atau bahan ajar yang memadai. Ketimpangan ini

berdampak pada efektivitas pelaksanaan pembelajaran, terutama dalam pemanfaatan platform digital seperti Merdeka Mengajar yang menjadi salah satu penunjang utama implementasi kurikulum ini. Sebagaimana disampaikan oleh Hidayati dan Siregar (2022) keberhasilan kurikulum tidak hanya bergantung pada isi dan tujuan, tetapi juga pada kesiapan konteks sekolah, termasuk infrastruktur pendukung yang memadai.

Peran guru sebagai agen perubahan dalam sistem pendidikan menjadi sangat krusial. Dalam konteks Kurikulum Merdeka, guru diharapkan mampu menjadi pembelajar sepanjang hayat (*lifelong learner*) dan reflektif terhadap praktik pengajarannya. Menurut Tilaar (2021) guru yang profesional adalah guru yang tidak hanya mampu menguasai materi, tetapi juga mampu melakukan inovasi dan adaptasi terhadap perubahan. Oleh karena itu, penguatan kapasitas guru melalui pelatihan, workshop, dan komunitas belajar menjadi sangat penting agar mereka tidak merasa bekerja sendiri dalam menerapkan kurikulum baru ini.

Lebih jauh lagi, kolaborasi antar pemangku kepentingan pendidikan seperti kepala sekolah, pengawas, dinas pendidikan, dan orang tua siswa juga sangat dibutuhkan. Implementasi Kurikulum Merdeka tidak dapat berjalan efektif jika hanya mengandalkan guru sebagai pelaksana utama. Studi yang dilakukan oleh Fauzi (2023) menunjukkan bahwa sekolah-sekolah yang memiliki sistem kolaboratif yang baik cenderung lebih cepat beradaptasi dengan perubahan kurikulum dan menunjukkan peningkatan kualitas pembelajaran. Kolaborasi ini penting tidak hanya untuk saling berbagi praktik baik, tetapi juga untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang mendukung inovasi.

Namun demikian, masih banyak guru yang menghadapi tekanan administratif dan beban kerja yang tinggi, sehingga menghambat proses adaptasi terhadap Kurikulum Merdeka. Beban tersebut mencakup penyusunan perangkat ajar, penginputan asesmen, serta tanggung jawab kegiatan sekolah lainnya. Berdasarkan laporan oleh Putri dan Suharyadi (2022) sekitar 70% guru SD menyatakan bahwa beban administratif menjadi salah satu faktor penghambat utama dalam pelaksanaan kurikulum. Hal ini menunjukkan bahwa reformasi pendidikan harus diiringi dengan upaya penyederhanaan beban guru dan penyediaan waktu yang cukup untuk perencanaan pembelajaran yang bermakna.

Oleh karena itu, penting dilakukan studi yang dapat merangkum berbagai tantangan yang dihadapi guru dalam implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di SD serta strategi yang telah atau dapat diterapkan untuk mengatasinya. Studi

literatur ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh yang dapat menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pendidikan maupun sebagai rujukan bagi praktisi pendidikan dalam meningkatkan kapasitas pelaksanaan Kurikulum Merdeka secara optimal.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur (*library research*) sebagai teknik utama dalam pengumpulan dan analisis data. Studi literatur dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan menganalisis berbagai tantangan serta strategi guru dalam implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di Sekolah Dasar berdasarkan kajian teori dan hasil-hasil penelitian sebelumnya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali data dari berbagai sumber sekunder yang bersifat akademik dan relevan dengan isu yang diteliti.

Sumber data dalam penelitian ini dikumpulkan dari berbagai publikasi ilmiah seperti jurnal nasional dan internasional yang terakreditasi, buku akademik, laporan kebijakan pemerintah, dan artikel dari portal ilmiah terpercaya. Kriteria inklusi dalam pemilihan sumber meliputi: (1) relevansi dengan topik Kurikulum Merdeka dan pendidikan dasar, (2) dipublikasikan dalam rentang waktu 2020 hingga 2025, dan (3) berasal dari penulis atau lembaga yang kredibel di bidang pendidikan. Sebanyak 30 sumber literatur yang memenuhi kriteria tersebut dianalisis secara mendalam.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan tematik (*thematic analysis*) yang bertujuan untuk mengidentifikasi pola berulang dalam literatur, baik yang berkaitan dengan tantangan yang dihadapi guru maupun strategi yang diimplementasikan untuk mengatasi tantangan tersebut. Proses analisis melibatkan beberapa tahap, yaitu: membaca dan memahami seluruh isi literatur secara cermat, melakukan koding terhadap informasi yang relevan, mengelompokkan kode menjadi tema utama, dan menafsirkan makna dari tema-tema yang muncul dalam konteks implementasi Kurikulum Merdeka di sekolah dasar.

Untuk menjaga validitas dan reliabilitas data, dilakukan triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan mengkonfirmasi informasi dari berbagai literatur yang berbeda guna memastikan keakuratan dan konsistensi temuan. Selain itu, peneliti juga menggunakan sintesis tematik (*thematic synthesis*) untuk mengintegrasikan berbagai perspektif yang ditemukan dalam literatur menjadi satu narasi terpadu yang sistematis dan logis. Dengan demikian, hasil analisis yang diperoleh tidak

hanya bersifat deskriptif tetapi juga reflektif terhadap konteks implementasi pendidikan di lapangan.

Prosedur penelitian dilakukan secara sistematis melalui langkah-langkah berikut: (1) menentukan topik dan rumusan masalah, (2) merancang strategi pencarian literatur dengan kata kunci seperti “Kurikulum Merdeka Belajar”, “tantangan guru SD”, “strategi pembelajaran berdiferensiasi”, dan “implementasi pendidikan dasar”, (3) melakukan seleksi dan review literatur, (4) melakukan analisis tematik, dan (5) menyusun hasil dan pembahasan berdasarkan temuan utama. Semua proses dilaksanakan dengan memperhatikan etika penelitian dan pencantuman sitasi sesuai standar akademik.

Dengan pendekatan dan metode yang digunakan, diharapkan penelitian ini mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkaya pemahaman mengenai dinamika implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar, serta menjadi rujukan praktis dan teoritis bagi para pendidik, pembuat kebijakan, dan peneliti pendidikan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Kurangnya Pemahaman Mendalam tentang Konsep Kurikulum Merdeka

Salah satu tantangan utama yang dihadapi guru dalam implementasi Kurikulum Merdeka Belajar adalah rendahnya pemahaman konseptual terhadap esensi kurikulum ini. Kurikulum Merdeka membawa paradigma baru yang menekankan pembelajaran yang lebih holistik, berpusat pada peserta didik, dan kontekstual. Namun, berbagai studi menunjukkan bahwa sebagian besar guru di Sekolah Dasar masih mengalami kesulitan dalam memahami prinsip-prinsip dasar kurikulum ini, seperti pembelajaran berdiferensiasi, asesmen formatif, serta penguatan profil pelajar Pancasila. Hasil penelitian Rahmawati & Rosnita (2022) mengungkapkan bahwa kurangnya pelatihan mendalam dan keterbatasan waktu dalam mempelajari kurikulum baru menjadi penyebab utama kurangnya pemahaman guru terhadap struktur dan strategi implementasi Kurikulum Merdeka. Akibatnya, proses pembelajaran yang seharusnya menyesuaikan dengan kebutuhan dan potensi masing-masing siswa belum terlaksana secara optimal.

Pembelajaran berdiferensiasi, sebagai inti dalam Kurikulum Merdeka, mengharuskan guru untuk mampu mengenali kebutuhan, minat, dan gaya belajar setiap siswa. Namun, dalam praktiknya, banyak guru menganggap pendekatan ini rumit karena memerlukan perencanaan yang lebih rinci dan pengelolaan kelas yang fleksibel. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Fitriani (2023) guru-guru di

daerah terpencil cenderung melaksanakan pembelajaran secara seragam karena keterbatasan sumber daya dan kurangnya pemahaman praktis dalam merancang aktivitas berdiferensiasi. Di sisi lain, asesmen formatif yang seharusnya menjadi alat reflektif untuk memperbaiki proses belajar, justru sering kali disalahartikan hanya sebagai pengumpulan nilai harian. Ketidakjelasan tentang bagaimana menerapkan asesmen yang bersifat diagnostik dan formatif juga menghambat guru dalam menjalankan evaluasi yang bersifat membangun.

Sementara itu, penguatan karakter melalui proyek profil pelajar Pancasila masih belum dipahami sebagai bagian integral dari kurikulum, melainkan hanya dianggap sebagai kegiatan tambahan. Guru cenderung memfokuskan diri pada aspek kognitif dan penguasaan materi, tanpa mengintegrasikan nilai-nilai karakter secara sistemik dalam pembelajaran. Hal ini diperkuat oleh temuan dari Susanto & Marzuki (2021) yang menunjukkan bahwa sebagian besar guru belum memiliki pemahaman yang utuh mengenai tujuh dimensi profil pelajar Pancasila dan cara penerapannya dalam pembelajaran tematik. Ketika guru belum memiliki fondasi pemahaman yang kuat tentang konsep-konsep tersebut, maka sangat sulit untuk mewujudkan transformasi pembelajaran yang diharapkan dalam Kurikulum Merdeka. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan berkelanjutan, komunitas belajar guru, dan pendampingan profesional untuk memperkuat pemahaman guru terhadap aspek esensial dari Kurikulum Merdeka.

b. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Pendukung Pembelajaran

Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar menuntut tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang pembelajaran yang berorientasi pada diferensiasi, teknologi digital, serta penguatan karakter siswa. Namun, kenyataannya, banyak Sekolah Dasar di Indonesia, terutama yang berada di daerah tertinggal dan terpencil, masih menghadapi keterbatasan fasilitas fisik dan sumber daya pendukung lainnya. Menurut hasil penelitian oleh Nurkholis & Yuliana (2022) kurangnya akses terhadap jaringan internet, tidak tersedianya perangkat TIK seperti laptop atau proyektor, dan keterbatasan bahan ajar digital menjadi kendala utama bagi guru dalam menerapkan strategi pembelajaran inovatif yang diamanatkan oleh Kurikulum Merdeka.

Ketika infrastruktur sekolah tidak mendukung, guru akan kesulitan untuk menerapkan pembelajaran berbasis proyek dan kegiatan eksploratif yang memerlukan akses pada informasi digital atau media pembelajaran interaktif. Proyek-proyek penguatan profil pelajar Pancasila, misalnya, sering kali

memerlukan sarana seperti alat praktik, bahan untuk eksperimen, atau ruang belajar yang fleksibel. Namun di banyak sekolah, ruang kelas masih minim peralatan, buku teks masih terbatas, dan guru harus berimprovisasi dengan media seadanya. Studi oleh Dewi & Mahmudah (2021) juga menunjukkan bahwa 68% guru di sekolah dasar negeri di daerah perdesaan menyatakan belum tersedia laboratorium sederhana atau sudut belajar tematik yang mendukung pembelajaran kontekstual.

Kondisi ini berdampak pada rendahnya efektivitas pelaksanaan kurikulum baru, karena guru tidak mampu menghadirkan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa. Pembelajaran berdiferensiasi pun menjadi sulit dijalankan karena tidak ada sumber belajar yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu siswa. Di sisi lain, ketimpangan sarana antara sekolah kota dan desa menimbulkan kesenjangan mutu pendidikan yang semakin nyata. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan distribusi sarana belajar yang adil dan merata ke seluruh satuan pendidikan, serta memberikan dukungan anggaran dan pelatihan kepada guru agar mampu memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara kreatif dan efektif.

c. Kompetensi Guru dalam Merancang Pembelajaran Berdiferensiasi

Salah satu inti dari Kurikulum Merdeka adalah pembelajaran berdiferensiasi, yaitu strategi mengajar yang menyesuaikan dengan kebutuhan belajar, minat, dan kesiapan siswa. Pembelajaran berdiferensiasi menuntut guru untuk memiliki kemampuan diagnostik yang baik terhadap karakteristik peserta didik serta keterampilan pedagogik dalam merancang variasi metode, materi, dan asesmen. Namun, studi oleh Maulidiyah & Harun (2022) mengungkapkan bahwa banyak guru masih mengalami kebingungan dalam mengimplementasikan pendekatan ini karena belum terbiasa melakukan pemetaan kebutuhan belajar siswa secara sistematis. Hal ini menyebabkan pembelajaran sering kali masih seragam dan berpusat pada guru.

Kendala utama dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi adalah keterbatasan guru dalam merancang RPP yang fleksibel dan adaptif. Banyak guru hanya memahami pembelajaran diferensiasi sebatas memberikan tugas yang berbeda kepada siswa, tanpa mempertimbangkan aspek kesiapan kognitif, gaya belajar, dan minat mereka. Menurut Handayani & Prihastuti (2023) kurangnya pelatihan khusus terkait strategi diferensiasi serta tidak adanya contoh praktis yang bisa dijadikan rujukan mengakibatkan guru kesulitan menerapkannya dalam kegiatan belajar mengajar sehari-hari. Selain itu, beban administratif dan jumlah

siswa dalam satu kelas juga menjadi faktor yang menghambat penerapan pembelajaran yang individualistik.

Untuk meningkatkan kompetensi guru dalam merancang pembelajaran berdiferensiasi, dibutuhkan program pengembangan profesional berkelanjutan yang tidak hanya teoritis, tetapi juga aplikatif. Pelatihan perlu difokuskan pada studi kasus, praktik langsung, dan pendampingan dalam menyusun desain pembelajaran yang responsif terhadap kebutuhan peserta didik. Selain itu, kolaborasi antar guru dan komunitas belajar dapat menjadi wadah saling berbagi strategi, pengalaman, dan sumber belajar. Peningkatan kompetensi guru dalam aspek ini sangat penting karena menjadi kunci dalam menciptakan proses pembelajaran yang adil, inklusif, dan bermakna dalam konteks Kurikulum Merdeka.

d. Minimnya Kolaborasi dan Komunitas Belajar Guru

Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar membutuhkan dukungan ekosistem pembelajaran yang kuat, termasuk adanya ruang kolaborasi antarguru dalam bentuk komunitas belajar profesional. Sayangnya, di banyak sekolah dasar, budaya kolaboratif ini belum berkembang secara optimal. Guru cenderung bekerja secara individual dalam menyusun perangkat ajar maupun menyelesaikan permasalahan pembelajaran. Hal ini diperparah dengan belum terbentuknya sistem pendampingan profesional secara terstruktur dari dinas pendidikan maupun sekolah. Penelitian oleh Fajriani & Rachmawati (2022) menunjukkan bahwa hanya sekitar 30% guru di tingkat SD yang aktif terlibat dalam forum diskusi atau komunitas guru secara rutin.

Minimnya keterlibatan guru dalam komunitas belajar menyebabkan kurangnya ruang refleksi terhadap praktik pembelajaran, terbatasnya pertukaran strategi inovatif, serta kesulitan dalam memahami implementasi kurikulum secara kontekstual. Guru juga sering kali mengalami stagnasi profesional karena tidak memiliki rekan diskusi untuk mengevaluasi dan mengembangkan pendekatan pembelajarannya. Menurut Yustiana dan Pramudita (2023) komunitas belajar sejatinya menjadi sarana strategis dalam meningkatkan kompetensi pedagogik, memperluas wawasan kurikulum, serta mengembangkan kepemimpinan instruksional guru. Namun, kendala seperti keterbatasan waktu, beban kerja, dan kurangnya motivasi membuat banyak guru enggan untuk berpartisipasi aktif.

Agar transformasi kurikulum berjalan efektif, perlu dibangun kultur kolaboratif yang kuat di tingkat sekolah melalui pembentukan komunitas praktisi guru (KPG), lokakarya internal, serta forum refleksi mingguan. Pemerintah dan kepala sekolah

juga perlu berperan sebagai fasilitator agar guru memiliki ruang aman dan terbuka untuk saling berbagi praktik baik dan tantangan. Pelibatan guru secara aktif dalam komunitas belajar akan mempercepat adopsi Kurikulum Merdeka sekaligus meningkatkan rasa kepemilikan terhadap perubahan pendidikan yang sedang berlangsung.

e. Dukungan Kebijakan dan Supervisi yang Masih Lemah

Keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka Belajar tidak hanya bergantung pada kapasitas guru, tetapi juga pada dukungan kebijakan dan pelaksanaan supervisi akademik yang efektif. Sayangnya, banyak guru Sekolah Dasar merasa bahwa kebijakan di tingkat daerah dan satuan pendidikan belum sepenuhnya mendukung semangat kurikulum ini. Studi oleh Aprilia dan Darmawan (2023) menemukan bahwa kepala sekolah dan pengawas seringkali belum memahami prinsip Merdeka Belajar secara mendalam, sehingga pendekatan supervisi yang dilakukan masih bersifat administratif dan kurang memberi ruang pada penguatan pedagogik guru.

Selain itu, lemahnya dukungan kebijakan tercermin dalam tidak konsistennya penyediaan pelatihan, minimnya pendampingan teknis, serta belum adanya regulasi internal sekolah yang mendorong inovasi kurikulum. Banyak kepala sekolah masih terpaku pada target-target formal administratif daripada mendampingi guru dalam menerapkan pembelajaran diferensiasi, asesmen formatif, dan proyek penguatan karakter. Penelitian oleh Siregar & Munir (2022) menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan antara perencanaan kebijakan dengan pelaksanaannya di lapangan, terutama dalam hal penyelarasan visi sekolah dengan semangat Kurikulum Merdeka.

Untuk mengatasi hal ini, perlu adanya reformulasi pendekatan supervisi pendidikan yang lebih menekankan pada coaching dan mentoring. Kepala sekolah dan pengawas perlu dibekali pemahaman substantif mengenai Kurikulum Merdeka serta diberi pelatihan tentang bagaimana melakukan supervisi berbasis peningkatan kualitas pembelajaran. Selain itu, pemerintah daerah perlu memperkuat regulasi yang memfasilitasi pelatihan berkelanjutan dan evaluasi kebijakan pendidikan secara partisipatif. Dukungan yang kuat dari struktur kepemimpinan pendidikan akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi guru untuk menjalankan kurikulum ini secara kreatif dan kontekstual.

4. KESIMPULAN

Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di Sekolah Dasar menghadirkan tantangan yang kompleks, mulai dari kurangnya pemahaman mendalam guru terhadap konsep kurikulum, keterbatasan sarana dan prasarana, hingga lemahnya dukungan kebijakan dan supervisi. Selain itu, rendahnya kompetensi dalam merancang pembelajaran berdiferensiasi serta minimnya keterlibatan dalam komunitas belajar turut memperlambat keberhasilan implementasi kurikulum ini. Hambatan-hambatan ini menunjukkan bahwa perubahan kurikulum tidak hanya menyangkut isi materi, tetapi juga membutuhkan transformasi menyeluruh dalam kapasitas guru, budaya sekolah, serta sistem pendukung yang terintegrasi.

Untuk menjawab tantangan tersebut, strategi yang dapat diterapkan antara lain adalah penguatan pelatihan guru berbasis praktik nyata, penyediaan fasilitas pembelajaran yang merata, pembentukan komunitas guru yang aktif, serta reformasi kebijakan supervisi yang menekankan pada pendampingan pedagogik. Diperlukan sinergi antara guru, kepala sekolah, pengawas, dan pemerintah daerah dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang adaptif dan kolaboratif. Dengan dukungan berkelanjutan, Kurikulum Merdeka Belajar dapat menjadi jalan menuju pendidikan yang lebih kontekstual, inklusif, dan berorientasi pada pengembangan karakter serta potensi siswa secara utuh.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, N., & Darmawan, H. (2023). Peran Supervisi Akademik dalam Mendukung Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di Sekolah Dasar. *Jurnal Kepemimpinan Pendidikan*, 7(1), 55–63.
- Dewi, R. K., & Mahmudah, U. (2021). Analisis Ketersediaan Sarana Pendukung Pembelajaran di SD Negeri Perdesaan. *Jurnal Pendidikan dan Teknologi*, 6(1), 55–64.
- Fajriani, D., & Rachmawati, L. (2022). Kolaborasi Guru dalam Komunitas Belajar sebagai Strategi Implementasi Kurikulum Merdeka. *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Praktik Sekolah*, 6(3), 89–98.
- Fauzi, A. (2023). Kolaborasi Pendidikan dalam Implementasi Kurikulum Merdeka. *Jurnal Kependidikan*, 17(2), 134–146.
- Fitriani, A. (2023). Tantangan Guru dalam Penerapan Pembelajaran Berdiferensiasi di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Dasar Indonesia*, 9(1), 34–42.

- Handayani, R., & Prihastuti, Y. (2023). Meningkatkan Kompetensi Guru dalam Pembelajaran Berdiferensiasi Melalui Pelatihan Berbasis Praktik. *Jurnal Inovasi Pendidikan dan Pembelajaran Sekolah Dasar*, 5(2), 101–110.
- Hidayati, N., & Siregar, R. (2022). Kesiapan Infrastruktur dalam Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 11(1), 45–57.
- Kemendikbudristek. (2022). *Panduan Implementasi Kurikulum Merdeka*. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Maulidiyah, L., & Harun, H. (2022). Tantangan Guru dalam Implementasi Pembelajaran Berdiferensiasi di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Dasar Nusantara*, 8(1), 37–46.
- Nurkholis, N., & Yuliana, S. (2022). Tantangan Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar Kawasan 3T. *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Kebudayaan*, 7(2), 113–121.
- Putri, N., & Suharyadi, A. (2022). Beban Administratif Guru dan Pengaruhnya terhadap Implementasi Kurikulum Baru. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 10(2), 88–99.
- Rahmawati, N., & Rosnita, D. (2022). Analisis Implementasi Kurikulum Merdeka pada Guru Sekolah Dasar. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, 41(2), 185–195.
- Siregar, F., & Munir, M. (2022). Kesiapan Kebijakan Daerah dalam Mengimplementasikan Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Pendidikan*, 10(2), 112–121.
- Susanto, A. (2021). *Pengembangan Pembelajaran di Sekolah Dasar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Susanto, R., & Marzuki, A. (2021). Persepsi Guru terhadap Profil Pelajar Pancasila dalam Pembelajaran Tematik. *Jurnal Inovasi Pendidikan Dasar*, 8(3), 202–210.
- Tilaar, H.A.R. (2021). *Manajemen Pendidikan Nasional: Kajian Strategik Kebijakan Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Widiastuti, R., & Kurniawati, D. (2023). Tantangan Implementasi Kurikulum Merdeka pada Jenjang Sekolah Dasar. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 29(1), 22–36.
- Yustiana, E., & Pramudita, P. (2023). Penguatan Komunitas Belajar untuk Meningkatkan Kompetensi Guru Sekolah Dasar dalam Kurikulum Merdeka. *Jurnal Pendidikan Dasar Berkemajuan*, 9(1), 42–51.